

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar *Australian Independent School* Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

I Ketut Rindawan^{a,1*}, Ni Luh Putu Sari Asih^{b,2}

^aUniversitas Dwijendra, Denpasar

^bAustralian Independent School

¹rindawan@undwi.ac.id 1; sariasih@ais-indonesia.com 2

ABSTRAK

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik. Pembelajaran di kelas seringkali siswa merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran karena pengaruh dari cara guru mengajar. Hal tersebut menekankan bahwa pentingnya guru berkualitas tinggi. Kebanyakan guru mata pelajaran sekarang masih dengan paradigam lama, yaitu guru sebagai pusat pembelajaran transfer pengetahuan dan latihan.pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila (PPKn) di Sekolah Dasar *Austalian Independent School* Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.Guru melakukan berbagai cara agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, seperti tanya jawab dan bantuan media internet. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik kepustakaan dan teknik observasi. Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dijabarkan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif adalah suatu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah *Australian Independent School* (AIS) berdasarkan hasil pengamatan pada materi dan kurikulum pembelajaran, ditemukan beberapa materi yang berkaitan dengan PPKn , yaitu;1) Ketuhanan ,meliputi: hidup rukun sesama yang berbeda agama dari berbeda Negara, 2) Kemanusiaan meliputi, mereka saling tolong menolong walaupun berbeda negara dan saling menghargai sesama teman, 3) Persatuan dan kesatuan, meliputi : hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, sikap positif sesama teman yang berbeda Negara,4) Keterbukaan dan jaminan keadilan dan norma- norma yang di lakukan di sekolah *Australian Independent School*(AIS), 5) Pancasila meliputi ; kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara.

Kata Kunci : *Australian Independent School* (AIS), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPPKn)

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup dan serta membimbing dalam mengajarkan kehidupan lahir batin yang makin baik di

dalam masyarakat.Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai- nilai

Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok ,landasan fundamental bagi pengaturan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

serta penyelenggaraan Negara. Pancasila mengandung nilai – nilai fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan Negara. Pancasila mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia makhluk pribadi dan makhluk sosial.

Penerapan nilai nilai Pancasila harus diterapkan dari masa anak – anak SD yang juga berbasis sekolah *Internasional*. Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan strategis dan penting dalam penerapan nilai – nilai pancasila membentuk sifat dan sikap siswa dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan setiap individu mampu menjadi pribadi yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan dan nilai nilai pancasila menuntut siswa menunjukkan sikap yang baik, kreatif, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan pelaksanaan pengajaran PPKn di sekolah nasional yang sudah berlangsung selama ini, Departemen Pendidikan Nasional kemudian menetapkan bahwa sekolah Internasional di Indonesia wajib memberikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran pada siswa yang berkewarganegaraan Indonesia di sekolah tersebut.

Anak bangsa yang belajar di sekolah internasional berhak mendapatkan materi kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan nasional. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa tetap dapat melanjutkan pendidikan lanjutnya di tanah air. Jangan sampai anak Indonesia ini tidak dapat bersekolah di negeri sendiri, hanya karena mereka lulusan sekolah internasional, kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar Bali. Hanya saja, tambahnya, seberapa komposisi penerapan kurikulum internasional dengan kurikulum nasional ini Dinas Pendidikan Kota Denpasar tak dapat menjelaskannya, karena monitoring dan pengawasan ini menjadi kewenangan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, lanjutnya. Ia juga menjelaskan, sekolah Internasional di Kota Denpasar yang tahun ini mengikutkan

siswanya dalam pelaksanaan UN. Meski berlabel sekolah Internasional, di sekolah ini juga diajarkan nilai- nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), sekolah dasar sebagai sebuah lembaga pendidikan dasar mempunyai peranan penting dalam penanaman dan pengetahuan nilai-nilai pancasila. Penanaman nilai-nilai pancasila dan pengetahuan mengenai Pancasila di sekolah dasar di lakukan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan di kembangkan dalam proses pembelajaran serta kegiatan ekstra kurikuler.

Guru dapat menegembangkan pengamalan sila Pancasila di kelas dengan memahami terlebih dahulu makna sila Pancasila dan mengembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Di lain pihak, *Australian Independent School (AIS)* yang terletak di jalan Raya Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)* mempunyai sumber daya dari siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Siswa di Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)* mempunyai karakteristik yang beragam dan berasal dari latar belakang keluarga dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)* juga mempunyai beberapa kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)* masih dijumpai beberapa siswa yang belum menampilkan akhlak yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Sikap ramah, sopan santun, suka menolong, dan menghormati orang lain sepertinya masih kurang melekat pada diri sebagian siswa tersebut. Namun demikian, banyak juga siswa yang sudah menampilkan akhlak terpuji yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti berpendapat bahwa sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan yang dilakukan anak di sekolah juga akan berdampak pada perkembangan moral dan kepribadian anak. Pendidikan dan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

pengamalan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk diterapkan dan dibiasakan pada anak. Mengingat pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)*.

Adapun tujuan tersirat dalam ketetapan tersebut adalah untuk mengenalkan dasar dan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa Indonesia yang bersekolah di sekolah *internasional*. Hal ini sangat penting mengingat pembentukan kepribadian siswa tersebut yang harus sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran PPKn di sekolah *internasional*, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh pihak sekolah, tenaga kerja dan siswa yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengajaran PPKn tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan pengajaran PPPKn di sekolah nasional yang sudah berlangsung selama ini, Departemen Pendidikan Nasional kemudian menetapkan bahwa sekolah Internasional di Indonesia wajib memberikan PPPKn sebagai salah satu mata pelajaran pada siswa yang berkewarganegaraan Indonesia di sekolah tersebut.

Adapun tujuan tersirat dalam ketetapan tersebut adalah untuk mengenalkan dasar dan nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa Indonesia yang bersekolah di sekolah *internasional*. Hal ini sangat penting mengingat pembentukan kepribadian siswa tersebut yang harus sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran PPPKn di sekolah *internasional*, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh pihak sekolah, tenaga kerja dan siswa yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengajaran PPPKn tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi Sekolah *Australian Independent School*

Visi Sekolah *Australian Independent school*

Visi AIS adalah agar siswa kami menjadi warga negara global yang percaya diri, mampu dan sadar secara sosial yang akan berkontribusi secara berarti kepada masyarakat di mana mereka tinggal dan bekerja. Tujuan kami adalah membantu siswa kami untuk mencapai potensi akademis dan sosial mereka dengan memberikan berbagai pilihan kurikulum yang menantang dan dengan membangun lingkungan belajar dimana gaya belajarmereka berbeda-beda. Pendekatan fokus siswa kami mencapai hasil yang baik karena ia bekerja pada etos penghargaan positif. Tujuan AIS Indonesia yang lebih luas sebagaimana tercantum dalam dokumen yang terkait dengan pendirian Yayasan pada tahun 1996 meliputi:

1. Mempromosikan pendidikan *Australian* di seluruh Indonesia dan Asia dengan mengadakan kesepakatan dengan organisasi lain di Asia dengan tujuan yang sama untuk berbagi sumber daya, gagasan dan pendidikan atau perlengkapan olahraga.
2. Menyiapkan program model yang mempromosikan program kebutuhan khusus atau pengajaran dalam program kebutuhan khusus
3. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun ketrampilan di Indonesia dalam pengajaran kebutuhan khusus
4. Memasuki kesepakatan dengan organisasi lain dalam menyiapkan program intervensi dini bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau untuk menyediakan akses ke pengembangan profesional berdasarkan pembagian biaya.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

5. Bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun ketrampilan di Indonesia dalam pengajaran metodologi dan pedagogi.

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan proses pembelajaran PPPKn

Didalam Implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PPPKn di Sekolah Dasar *Australian Independent School* Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yaitu;

- a. Proses belajar mengajar mata pelajaran PPKn di Sekolah Dasar *Australian Independent School (AIS)* berjalan lancar sebagai mana mestinya dan murid yang belajar PPPKn tidak banyak seperti di sekolah lokal.
- b. Tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran PPPKn masih perlu ditingkatkan karena ada faktor siswa yang masih mengalami kesulitan untuk mempelajari Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) sangatlah sulit tapi dengan bimbingan guru maka siswa pun bisa mengerti tentang pelajaran PPPKn dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik.
- c. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah AIS cukup bagus, karena bagi siswa yang berkewarganegaraan Indonesia bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) dan bisa melanjutkan sekolah di Indonesia.
- d. Materi yang disampaikan guru ke siswa cukup bagus dan guru menggunakan media internet untuk mengacu pembelajaran PPKn.

Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajaran di Sekolah Dasar *Australian Independent School* Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Adapun faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajaran di

Sekolah Dasar *Australian Independent School* Kerobokan yaitu;

- a. Kesulitan yang dialami dalam proses belajar mengajar PPKn masih banyak, karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa yang digunakan sehari – hari bahasa Inggris.
- b. Kendala dalam proses belajar PPKn yang utama adalah bahasa dan materi untuk proses belajar mengajar, serta kemampuan siswa untuk memahami pelajaran PPKn.
- c. Dalam mengajarkan materi PPKn guru menggunakan media pembelajaran tetapi media pembelajaran sangat terbatas di sekolah *Australian Independent School*.
- d. Sebagai siswa kesulitan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya dalam bahasa, dan guru harus mentranslet dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, supaya siswa mengerti dan memahami penjelasan guru di dalam materi.
- e. Materi yang diajarkan memanglah sangat sulit bagi siswa tetapi guru selali mempunyai cara agar siswa bisa mengikuti pelajaran sebagai mana mestinya.

Usaha usaha yang dilakukan guru untuk memberikan motivasi siswa dalam pembelajaran PPPKn.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik siswanya agar lebih maju kedepannya. Pembelajaran PPKn memberikan dampak positif bagi siswa dan orang tua murid, melalui pembelajaran PPKn siswa di harapkan mampu menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab untuk mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik serta mampu menemukan jati dirinya, dan dapat mewujudkan kehidupan yang demokrasi, berkeadilan dan kemanusiaan.

Materi pembelajaran PPKn memberikan distribusi positif untuk menuju siswa yang lebih baik lagi, materi yang diajarkan tersebut seperti mengenai nilai –

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

nilai pancasila, hak asasi manusia, demokrasi dll. Seperti pada pembelajaran pancasila, siswa diberikan berbagai pemahaman tentang makna dari tiap sila – sila pancasila, sila sila pancasila tersebut menjadi satu acuan bagi siswa untuk memilih masa depan mereka.

Selain melalui pembelajaran PPPKn, guru sebagai menumbuh kembangkan siswa agar lebih berminat didalam pembelajaran PPPKn.

1. Memberikan motifasi siswa agar lebih giat belajar di dalam pembelajaran PPKn.
2. Siswa tidak diberi kesempatan atau kebebasan memilih seperti diatas (pendekatan evokasi-pen) tetapi diajak untuk berfikir atau berbuat menurut pola-pola yang sudah ditetapkan (perhitungan secara matang)
3. Suatu kasus yang dimanipulasikan dalam cerita pendek tertentu (cerita sebagai stimulusnya).
4. Siswa diajak dahulu menyepakati sesuatu pola yang akan disajikan kriteria/indikator penilaian atau perbuatan. Setelah itu barulah mereka diajak menela sesuatu atau melakukan sesuatu atas dasar criteria yang dispakati tersebut.
5. Dalam pembelajaran PPKn guru merupakan modelling yang sangat berperan untuk mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Anak akan melihat dan mengamati apa yang di lakukan model kemudian menirukannya dalam perilaku. Selain guru model yang di gunakan dalam pembelajaran PPKn dapat berupa manusia, misalnya tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pemimpin negara, pahlawan bangsa. Non manusia, misalnya menggunakan kancil dalam cerita dongeng.
 6. Gaming merupakan metode pembelajaran PPKn yang menuntut siswa untuk berlomba-lomba menang atau kalah. Penentuan menang kalah di lihat dari sisi skor, adu kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal dengan benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di sekolah dasar Australian Independent School Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Mengenai Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila (PPPKn) dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah Australian Independent School. Cukup baik dan siswa juga masih banyak perlu bimbingan ,karena di dalam materi menggunakan bahasa Indonesia tetapi siswa dalam kesehariannya memakai bahasa Inggris .
2. Melakukan tinjauan terhadap materi pembelajaran PPKn, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah Australian Independent School di jalan raya Kerobokan kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung.
3. Melaksanakan wawancara untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah Australian Independent School di jalan raya Kerobokan kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa PPKn di AIS masih memerlukan perhatian dan bahan dari buku juga harus perlu dalam bahasa inggris

Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan kewarganegaraan

1. Tingkat keberhasilan anak – anak dalam proses pembelajaran PPKn masih perlu ditingkatkan karena ada faktor siswa yang masih mengalami kesulitan untuk memahami tentang PPKn.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

2. Kesulitan yang dialami dalam proses belajar mengajar PPKn masih banyak, karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahas
3. Kendala dalam proses belajar PPKn yang utama adalah bahasa dan materi untuk proses belajar mengajar, serta kemampuan siswa untuk memahami pelajaran PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin Salam. (1996). *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: CV Rineka Cipta.
- Burhan, B (2008). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group: Jakarta
- Daryono. (2008). *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Eka, R, et al. (2013). *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hadi, P.H. (1994). *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta:
- Huges, J.A (1990) *The Philosophy of Sicoal Recsearch* (Terjemahan) Harlow : Lognam
- Herdiansyah, Harris. (2015). *Wawancara, Observasi, dan focus groups sebagai instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.kemendikbud.go.id/main/sekolah-dasar>. diakses pada 14 Maret 2018
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Marini, A. (2014). *Manajemen Sekolah Dasar*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Narmoatmojo, W. (2014). *Seri Pendidikan Politik buku 1 Pancasila dan UUD 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016.
- Rindjin, K. (2012). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarinah, Muhtar Dahri, & Harmaini. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish .
- Sugihartono, Fathiyah, K.N., Setiawati, F.A. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sunoto. (1995). *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatann Melalui Metafisika, Logika dan Etika*. Yogyakarta:
- Susanti, D. (2013). "Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak". Diambil dari lib.unnes.ac.id/19978/3301409054.pdf pada 14 Maret 2018.
- Susilo, M.J. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*.
- Ubaidillah, A. dan Abdul Rozak. (2006) *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.